

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (BOS SMA)  
PADA SMA NEGERI 4 PULAU GOROM  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU**

**Elok Rahmawati**  
[elokrachma@gmail.com](mailto:elokrachma@gmail.com)  
SMA Negeri 4 Pulau Gorom

**ABSTRACT**

*Senior High School Operational Assistance (BOS SMA) is a central government assistance program to provide funding for personnel and non-personnel operating costs for schools sourced from non-physical special allocation funds. One of the factors that influenced the success of the BOS program was the implementation of BOS funds in accordance with BOS technical guidelines and all available resources in the implementation of the BOS program. The purpose of this study is to describe the use of BOS funds and the impact on students in the teaching and learning process of the 2019/2020 school year. This study used descriptive qualitative method. The results showed that the use of BOS funds by schools was in line with BOS guidelines, flexible, efficient, and effective. although in the realization there are still components that have not been implemented because of the priority scale, according to the needs of the school that is flexible.*

*Keywords: evaluation, BOS implementation, SMA Negeri 4 Gorom Island*

**ABSTRAK**

Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) adalah program bantuan pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah implementasi dana BOS yang sesuai petunjuk teknis BOS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan dana BOS dan dampak bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar tahun pelajaran 2019/2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS yang dilakukan sekolah sudah sesuai juknis BOS, fleksibel, efisien, dan efektif. walaupun dalam realisasi masih ada komponen yang belum terlaksana karena skala prioritas, sesuai dengan kebutuhan sekolah yaitu fleksibel.

Kata kunci: evaluasi, implementasi BOS, SMA Negeri 4 Pulau Gorom

## PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan sumber daya manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, pemerintah Indonesia dalam undang-undang dasar iirepublic Indonesia tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2014-2019 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dan menengah yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini dirasakan kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar dan menengah.

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) pada SMA Negeri 4 Pulau Gorom Seram Bagian Timur Maluku dan mengevaluasi dampak BOS SMA terhadap Proses Belajar Mengajar.

## TINJAUAN TEORETIS

### Kebijakan Publik

Pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua

masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan dibuat benar-benar atas nama sebuah kepentingan publik, untuk dalam mengatasi masalah dan dalam memenuhi keinginan dan tuntunan semua anggota masyarakat. Menurut Amara Raksataya mengungkapkan bahwa kebijakan publik yakni sebuah kebijakan yang sebagai sebuah taktik dan strategi yang diarahkan dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Arnold Rose, kebijakan publik adalah Selanjutnya kebijakan dipandang sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan sebuah rangkaian suatu tindakan yang saling berubungan. Menurut Bill Jenkins mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang berdasarkan pada hubungan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah aktor politik agar untuk menentukan sebuah tujuan dan mendapatkan sebuah hasil yang berdasarkan suatu pertimbangan situasi tertentu. ([www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id)). Dari berbagai definisi menurut beberapa teori kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan aktor utama dalam melaksanakan kebijakan publik yang ditujukan untuk memenuhi keinginan dan tuntunan seluruh masyarakat demi kepentingan masyarakat (publik).

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan, maka pemimpin harus melakukan kegiatan kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian dan pelbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mengatur dan mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya yang mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan, penyelewengan atau

ketidakcocokan maka pemimpin dihadapkan kepada keharusan menempuh langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Dan apabila semuanya berjalan baik, demi kemajuan organisasi, yang bersangkutan selalu harus diadakan aktivitas penyempurnaan atau melakukan evaluasi.

Cochran (2012:11) mengungkapkan tentang evaluasi kebijakan merupakan proses pelibatan, pengumpulan dan penganalisaan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kebijakan. Cochran memberikan dimensi dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu: 1) Efisiensi kebijakan, untuk melihat biaya aktif untuk tujuan utama, 2) Efektivitas kebijakan, untuk melihat sejauh mana tujuan mendasar dan kebutuhan sasaran/warga terpenuhi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur dari sisi efisiensi, efektivitas maupun outcome kebijakan.

### **Evaluasi Dampak Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik yang diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah akan membawa konsekuensi kepada warga negaranya. Oleh Dunn konsekuensi kebijakan tersebut dibagi dalam dua jenis, Keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.

Menurut W.N. Dunn mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan,

kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan. Menurut G. Peters mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah, baik yang dikerjakan sendiri atau melalui suatu lembaga lain, yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.

Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

([www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id))

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikub RI no.8, 2017)

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Anderson (dalam Arikunto, 2004) memandang evaluasi sebagai sebuah proses penentuan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Anderson juga menyampaikan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto, 2004), mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Untuk dapat mengusahakan oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries).

Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi, ada dampak yang diharapkan dan ada dampak yang tidak diharapkan. Evaluasi/penilaian dampak, seperti yang didefinisikan oleh Rossi dan Freeman bahwa penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan efek bersih dari sebuah intervensi.

Adapun metodenya antara lain:

- (1) Membandingkan problem/situa/si/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi.
- (2) Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi.
- (3) Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi.
- (4) Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu.
- (5) Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program.
- (6) Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan.
- (7) Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi.

Tujuan penilaian dampak adalah

DOI: <https://doi.org/10.37504/map.v6i2.540>

untuk menunjukkan bagaimana suatu kebijakan atau program tertentu sudah bekerja atau belum bekerja untuk memenuhi tujuan kebijakan/program yang diajukan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Langbein menyebutkan ada empat dimensi dampak yang penting untuk diperhatikan, yaitu: (1) Waktu. (2) Selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan, dan (4) Jenis dampak.

Evaluasi dampak kebijakan yaitu perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana suatu kebijakan atau program tertentu sudah bekerja atau belum bekerja untuk memenuhi tujuan kebijakan/program yang diajukan oleh pemerintah.

Fokus analisis dampak penggunaan dana BOS pada SMA Negeri 4 Pulau Gorom adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan. Adapun dimensi yang dikaji adalah selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan. Artinya mengkaji kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat pengguna layanan (expected service) dengan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan (percieved sevice), dimana hal tersebut merupakan tolok ukur dari tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan atau kinerja penyelenggara pelayanan.

### **Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Nilai BOS untuk SD sebesar Rp.800.000/peserta didik setiap 1 tahun;

SMP sebesar Rp.1.000.000/peserta didik setiap 1 tahun; SMA sebesar Rp.1.400.000/peserta didik setiap tahun; SMK sebesar Rp1.600.000/peserta didik setiap tahun; dan SDLB, SMPLB, SMALB, SLB Sebesar Rp 2.000.000/peserta didik setiap 1 tahun. Secara umum BOS bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena bertujuan untuk melukiskan dan menggambarkan suatu gejala sosial yakni dengan membangun abstraksi, konsep, hipotesa, dan teori melalui data lapangan.

Adapun fokus masalah mengenai Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) pada SMA Negeri 4 Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku diantaranya adalah: Evaluasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) dimplementasikan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan pada SMA Negeri 4 Pulau Gorom, Seram Bagian Timur, Maluku. Kedua, dampak dari Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) terhadap Proses Belajar mengajar pada SMA Negeri 4 Pulau Gorom, Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejarah singkat SMA Negeri 4 Pulau Gorom berdiri pada tahun 2011 dengan nama SMA LKMD Amarsekaru bertempat di desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur pada waktu itu pertama kali yang

menjadi kepala sekolah adalah kepala sekolah yang definitifnya di SMP Negeri 4 Pulau Gorom, dan oleh masyarakat ditunjuk untuk merangkap memimpin di SMA LKMD Amarsekaru namanya adalah Dait Rumodar.

Seiring berjalannya waktu karena suatu hal bapak Dait Rumodar dipindahtugaskan di sekolah lain, diangkatlah kepala sekolah selanjutnya Nurdin Kilubas yang memimpin SMA LKMD dari tahun 2012 s.d 2016 karena meninggal dunia akhirnya kepemimpinan yang ke tiga yaitu Moch. Kuspriyanto dan pada tahun 2016 itu juga sekolah sudah menjadi negeri dengan nama SMA Negeri 4 Pulau Gorom masih dipegang oleh kabupaten, SMA mulai 2017 sampai dengan sekarang sudah dipegang oleh pemerintah provinsi Maluku.

### **Penggunaan BOS SMA**

#### **a. Pengembangan Perpustakaan**

Sesuai dengan penjelasan informan penelitian dalam pengembangan perpustakaan ini dapat disimpulkan bahwa, sekolah melaksanakan Pembelian Buku Teks Utama dan Buku Teks Pendamping, sudah terlaksana dengan baik. Untuk pembelian buku memilih harga yang terjangkau mengacu kepada HET yang telah ditetapkan kementerian, dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan dan yang telah dinilai oleh kementerian.

Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud RI No.8. 2017), dan penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip eektivitas yaitu penggunaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah (Permendikbud No.3 tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (outputs) dan dampak

(impact). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries). sedang dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan keluaran kebijakan tersebut. Untuk dimensi penerimaan peserta didik baru dapat disimpulkan sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### b. Kegiatan Pembelajaran dan Ektrakurikuler

Suatu Pembelajaran adalah kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah dalam kegiatan pembelajaran ini diperlukan administrasi yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan pembelajaran diantaranya:

Melaksanakan Pembelian Alat Habis Pakai sudah terlaksana dengan baik dan jika ada yang belum terlaksana pasti nantinya akan direalisasikan secara bertahap hingga semua dapat terlaksana dengan disesuaikan kebutuhan dan anggaran yang ada.

Melaksanakan Pembiayaan kegiatan remedial sudah terlaksana dengan baik dan kegiatan remedial dijadwalkan sesuai kebutuhan peserta didik. Melaksanakan Pembiayaan Untuk Mengembangkan Media Pembelajaran Berbasis TIK sudah terlaksana dan disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan yang ada karena anggaran yang belum terjangkau maka pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap.

Melaksanakan Pembelian atau Langganan Buku Digital sudah terlaksana dan disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan yang ada karena anggaran yang belum terjangkau maka pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap

#### c. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi Pembelajaran adalah kegiatan yang utama dalam suatu sekolah, sekolah yang tidak melakukan evaluasi pembelajaran sebegus apapun sekolahnya maka akan dikatakan tidak efektif untuk

itu SMA negeri 4 Pulau Gorom melaksanakan Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Kenaikan Kelas, Ujian Sekolah, Ujian Sekolah Berbasis Nasional, Ujian Nasional/Ujian Nasional Berbasis Komputer Sekolah juga melaksanakan Simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer sudah terlaksana dan disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan yang ada, pelaksanaanpun sesuai dengan SK Kepala Sekolah dan sekolah atau komite tidak menarik/meminta pembayaran apapun untuk pelaksanaan ujian/ulangan.

Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud RI No.8. 2017) dan penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas yaitu penggunaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah (Permendikbud No.3 tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (*output*) dan dampak (impact). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries). sedang dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud Ri No.8. 2017) dan penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah. (Permendikbud No.3 tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (*output*) dan dampak (impact). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang

diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries). sedang dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan keluaran kebijakan tersebut.

Untuk dimensi pengelolaan sekolah dapat disimpulkan sudah fleksibel, tetapi belum sepenuhnya efektif karena masih ada salah satu sub dimensi yang belum dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### d. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam suatu organisasi maka sumber daya manusia harus baik dan mampu dalam suatu kegiatan, sedangkan untuk pembiayaan kegiatan MGMP, MKKS dan lokakarya belum terlaksana dengan baik karena sesuai dengan keadaan geografis dan anggarannya belum terjangkau.

Untuk dimensi Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah dapat disimpulkan sudah fleksibel, tetapi belum sepenuhnya efektif karena masih ada salah satu sub dimensi yang belum dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### e. Langganan Daya dan Jasa

Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa sudah terlaksana dengan baik seperti listrik, telepon, dan internet, sekolah sudah memasang wivi satelit mulai bulan Oktober 2019. Listrik, telepon, internet adalah kebutuhan sehari-hari yang penting untuk dipergunakan, di SMA Negeri 4 Pulau Gorom listrik nyalanya malam hari saja dan siangya tidak nyala, jadi kalau siang hari ada kegiatan sekolah menyalakan genset.

Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud RI No. 8. 2017) dan

DOI: <https://doi.org/10.37504/map.v6i2.540>

penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip eektivitas yaitu penggunaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah (Permendikbud No. 3 tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (outputs) dan dampak (impact). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries). sedang dampak kebijakan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan keluaran kebijakan tersebut. Untuk dimensi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah dapat disimpulkan sudah efektif karena sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### f. Pembayaran Honor

Membayar Guru Honor yang diselenggarakan pemerintah/masyarakat dan memiliki kualifikasi akademik S 1/D IV dan mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah akan dibayar honor 15% dari total BOS di sekolah, dan pembayaran honor sudah terlaksana dengan baik, cara pembayarannya disesuaikan jam kerja, jam, mengajar, dan jam extra kurikuler. Disamping mendapatkan honor juga mendapatkan konsumsi dan transportasi, semua itu dibiayai oleh BOS reguler dan BOS Daerah. Sekolah tidak meminta sumbangan komite dari walimurid untuk membayar honor guru, karena bantuan pemerintah sudah cukup untuk membayar guru honor yang ada sesuai dengan juknis BOS, pembayaran honor perjam 25.000 sebanyak 15 guru per bulan, karena tahun 2019 ini pembayaran honor dibatasi 15% dari total BOS.

Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud Ri No.8. 2017) dan penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas yaitu penggunaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah (Permendikbud No.3 tahun 2019).

### **Dampak (Impact)**

Salah satu program dibidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

Dari segi pencapaian hasil, penggunaan dana BOS yang mengacu pada mutu pendidikan sangat dirasakan oleh orangtua siswa. Secara umum mutu diartikan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan penelitian dalam dimensi menunjang wajib belajar dua belas tahun dapat disimpulkan bahwa Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin di sekolah yaitu sesuai dengan visi, misi kita mewujudkan peserta didik yang berakhlak. Jangan sampai ada peserta didik yang putus sekolah dikarenakan biaya, karena SMA Negeri 4 Pulau Gorom siap menampung peserta didik yang tidak mampu dengan biaya gratis.

Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud Ri No.8. 2017) dan

DOI: <https://doi.org/10.37504/map.v6i2.540>

penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi yaitu penggunaan dana BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal (Permendikbud No.3 tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (outputs) dan dampak (impact). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries). sedang dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan keluaran kebijakan tersebut. Untuk dimensi Meningkatkan Mutu Pendidikan dapat disimpulkan sudah efektif dan efisien karena sudah di komitmen sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola Operasional Prosedur (SOP).

### **Pembahasan**

#### **1. Menunjang Program Sekolah 12 Tahun**

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Untuk dimensi pengembangan perpustakaan dapat disimpulkan sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk dimensi penerimaan peserta didik baru dapat disimpulkan sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Untuk dimensi kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dapat disimpulkan sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk dimensi kegiatan evaluasi pembelajaran dapat disimpulkan sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Untuk dimensi pengelolaan sekolah sudah fleksibel tetapi belum sepenuhnya efektif. Sumber dana sekolah ternyata berasal dari BOS Daerah dan BOS Pusat, dari kedua komponen tersebut ternyata biaya operasional sekolah sudah

tidak tergantung pada sumbangan orang tua murid melainkan dari dana BOS, Jadi kalau memang ada komponen-komponen yang belum terpenuhi diusahakan untuk tahun selanjutnya semua dapat terpenuhi sesuai dengan juknis BOS.

Pembiayaan PPDB merupakan hal yang harus dilakukan dalam suatu instansi karena dengan PPDB ini kita akan mendapatkan siswa yang masuk ke suatu sekolah dan harus ada mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan dimulai persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi sampai dengan pengenalan lingkungan sekolah, sekolah melaksanakan Penentuan Peminatan dengan bertanya langsung kepada siswa disamping hasil tes dan nilai dari jenjang SMP/MTS, sekolah melaksanakan pembiayaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dimulai dengan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi sampai dengan pengenalan lingkungan sekolah, semua itu berdasarkan SK Kepala Sekolah dan juknis BOS.

Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud RI No.8. 2017) dan penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip eektivitas yaitu penggunaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah (Permendikbud No.3 Tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran dan dampak, keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). sedang dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan keluaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sekolah melaksanakan Kegiatan Pembinaan

Ekstrakurikuler sudah terlaksana dengan baik dan semua kegiatan ekstrakurikuler dibiayai sekolah dan orangtua tidak membayar apapun dalam kegiatan ini.

Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud No.8. 2017) dan penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip eektivitas yaitu penggunaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah (Permendikbud No. 3 tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (*outputs*) dan dampak (*impact*). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Sedang dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan keluaran kebijakan tersebut.

Untuk dimensi Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler dapat disimpulkan sudah efektif karena sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk dimensi Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dapat disimpulkan sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa sekolah melaksanakan Pembelian dan Pemasangan Alat Absensi Bagi Guru dan Staf belum terlaksana kita memilih skala prioritas karena kebutuhan dan letak geografis belum terlalu dibutuhkan dan juga anggaran yang belum terjangkau maka pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap.

Hambatan dalam penelitian ini yaitu, ada satu item komponen pengelolaan sekolah belum terlaksana karena skala prioritas, mungkin di daerah tersebut seperti finger print scanner belum dibutuhkan masih memakai daftar hadir manual jadi sekolah

belum membeli alat kehadiran elektronik tersebut

Rekomendasi, jika alat kehadiran elektronik sudah dibutuhkan oleh dinas provinsi untuk memantau sekolah sebaiknya SMA Negeri 4 Pulau Gorom dapat membeli alata tersebut walaupun dengan bertahap.

Untuk Pembiayaan Transportasi dalam rangka pengambilan dana di bank, Pengelolaan Sekolah Melalui Aplikasi yang sudah disiapkan oleh kementerian sudah terlaksana dengan baik seperti dapodik, PMP, e-raport, bos dan lain-lain sesuai dengan juknis BOS. Sesuai dengan teori evaluasi adalah Komponen Biaya Perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan dan saluran air kotor di sekolah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan juknis BOS

Membayar guru honorer di sekolah sudah terlaksana dengan baik, cara pembayarannya disesuaikan jam kerja, jam, mengajar, dan jam extra kurikuler. Disamping mendapatkan honor juga mendapatkan konsumsi dan transportasi, semua itu dibiayai oleh BOS reguler dan BOS Daerah. Sekolah tidak meminta sumbangan komite dari walimurid untuk membayar honor guru, karena bantuan pemerintah sudah cukup untuk membayar guru honor yang ada sesuai dengan juknis BOS.

Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud Ri No.8. 2017) dan penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah. (Permendikbud No.3 tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (outputs) dan dampak (impact). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau

kelompok penerima (*beneficiaries*). sedang dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan keluaran kebijakan tersebut.

Saran dan Prasarana sekolah sangat penting untuk dijaga dan dipelihara komponen Biaya Perbaikan atau pembelian mebeler seperti pembelian meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan karena banyak kursi yang rusak yang harus diperbaiki, sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan juknis BOS.

Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud RI No. 8. 2017) dan penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip eektivitas yaitu penggunaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah (Permendikbud No.3 tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (outputs) dan dampak (impact). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). sedang dampak kebijakan merupakan perubahan kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (outputs) dan dampak (impact). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). sedang dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan keluaran kebijakan tersebut. Untuk dimensi Pembayaran Honor dapat disimpulkan sudah efektif karena sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Membeli komputer dekstop maks 5 unit, printer plus scanner 1 unit, dan laptop 1 unit di sekolah sudah terlaksana

dengan baik kalau 5 unit untuk satu tahun belum sampai, akhirnya sekolah mencari jalan alternatif lain yaitu meminta bantuan dari dinas propinsi maupun dinas pusat.

Sesuai dengan teori evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan (Permendikbud Ri No.8. 2017) dan penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip eektivitas yaitu penggunaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah (Permendikbud No.3 tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (outputs) dan dampak (impact). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau (Permendikbud Ri No.8. 2017) dan penggunaan dana BOS sudah dilakukan berdasarkan prinsip efesiensi yaitu penggunaan dana BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal (Permendikbud No.3 tahun 2019). Dan juga sesuai dengan teori Dunn Konsekuensi kebijakan dibagi dua jenis, yaitu keluaran (outputs) dan dampak (impact). keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries). sedang dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan keluaran kebijakan tersebut. Untuk dimensi Menunjang Wajib Belajar 12 Tahun dapat disimpulkan sudah efektif dan efisien karena sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

## 2. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Peningkatan Akses dan Perluasan Layanan di sekolah yaitu berkembangnya teknologi, pengetahuan, dan peserta didik dapat mengenal dunia luar. Adapun

DOI: <https://doi.org/10.37504/map.v6i2.540>

peningkatan kuantitas peserta didik setiap tahun bertambah 10-20% dan ruangan juga bertambah dari tahun 2016 hanya 3 ruang, tahun 2020 sudah menjadi 10 ruangan. Untuk perkembangan siswa mulai dari teknologi, pengetahuan tidak hanya di kelas saja tetapi bisa juga diakses melalui internet atau dari luar kelas, siswa setiap tahun selau lulus 100%, dan dapat diterima berbagai perguruan tinggi negeri ataupun swasta dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengembangan manajemen sekolah sudah fleksibel tetapi belum sepenuhnya efektif karena ada salah satu sub dimensi yang belum dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Untuk dimensi Meningkatkan Mutu Pendidikan dapat disimpulkan sudah efektif dan efisien karena sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dampak Program BOS dengan Proses Belajar Mengajar sudah efisien dan efektif dengan adanya peningkatan pelayanan masyarakat miskin dan turunnya angka drop out bahkan mengajak peserta didik yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah di SMA tanpa biaya apapun, dan semakin berkembang dan meningkatnya siswa yang masuk pada SMA Negeri 4 Pulau Gorom. efektif, dan efisien artinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum buku banduan dan juknis BOS. Meskipun demikian hasil penelitian telah mengungkap masih terdapat beberapa kelemahan yang kiranya perlu mendapatkan perhatian bagi kepala Sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola dana BOS.

## SIMPULAN

Untuk dimensi Meningkatkan Mutu Pendidikan dapat disimpulkan sudah efektif dan efisien karena sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). hendaknya penggunaan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar

sesuai dengan buku Panduan BOS yang ditetapkan oleh pemerintah, karena satu sub dimensi yang belum terpenuhi.

Untuk dimensi pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan dan untuk dimensi langganan daya dan jasa dapat disimpulkan sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk dimensi pembayaran honor dapat disimpulkan sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk dimensi pengembangan perpustakaan dapat disimpulkan sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Untuk dimensi pembelian alat multi media dapat disimpulkan sudah efektif karena dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada dasarnya pelaksanaan program BOS tahun 2019 oleh lembaga sekolah SMA Negeri 4 Pulau Gorom telah dilaksanakan dengan baik yaitu fleksibel,

## DAFTAR PUSTAKA

Dona, L I, Kismartini, AUFARUL, M. 2015. Evaluasi Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMP N) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang (<https://jurnal.untad.ac.id>)  
Mardiyati. 2018. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Sleman Tahun 2017 (<https://eprint.stieww.ac.id>).  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

[www.jdih.kemdikbud.go.id](http://www.jdih.kemdikbud.go.id).

Masalah Bos Bikin Ngeri-neri sedap, Dindik Kab.Tangerang Bakal berikan pendampingan

(<https://nonstopnews.id/category/kabupaten-tangerang>).

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli Terlengkap (<https://www.gurupendidikan.co.id>)

Moelong, L. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, F. A. 2016. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara).

(<http://journal.unhas.ac.id>).

Muhammad. W, Bambang, S.H, Minto, H. 2017. Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu

Pendidikan (Studi pada Sekolah Dasar Neheri Percobaan KotaMalang. (<http://repository.ubac.id>).

Nurmala. 2017.Evaluasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Negeri di kecamatan Palu Timur (<http://jurnal.untad.ac.id>).

Masita. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong

(<http://www.fisip.undip.ac.id>)

Rusli, B. 2015. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera.

